



menemukan dokumen-dokumen yang dicarinya. Ketika pencekikan itu terjadi, MAB berupaya meleraikan, tetapi malah terkena bogem mentah PR dan setelah itu ditimpa dengan alat-alat olahraga. Mengetahui MAB dalam keadaan berdarah-darah, PR malah pergi melenggang keluar kamar dan menghidupkan televisi. Selain itu, PR tidak memperbolehkan NA membawa MAB ke rumah sakit.

"Apa yang ditulis dalam tuntutan *ngaco*, tidak benar. Jelas-jelas direkayasa penuntut umum. Apa yang digembar-gemborkan dan dikatakan NA dan MAB di persidangan, saya memukul, itu tidak benar. Yang benar adalah pada saat saya tarik NA, MAB menggaet alat peninggi badan. Dimana alat peninggi badan ini menimpa ke mukanya," kata PR. Akibat benturan benda tumpul itu, MAB menderita bengkak dan robek di bagian bibir atas dan bawah.

Lagipula, tambah PR, MAB bukanlah anak kandungnya. MAB adalah anak hasil pernikahan NA dengan suami sebelumnya, yaitu SB. Sementara, NA juga bukanlah istri yang sah secara hukum. PR mengaku menikahi NA secara siri pada 1 Januari 2001. Sehingga, delik UU PKDRT ataupun UU PA tidak dapat dikenakan terhadap PR. "Dia (NA) sebagai istri yang saya nikahi siri dan MAB adalah anak hasil pernikahan NA dengan SB. Kalau lihat secara utuh (Pasal 44 ayat (1), itu kan berada dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang diakui adalah pernikahan yang sah. Jadi, tidak bisa (dikenakan pasal dalam UU PKDRT tersebut)," teranginya.



telah diganggu oleh anak orang lain" lalu saksi korban menjawab "alasan saya tidak mau bercerita karena tidak mungkin Iha saya marahi anak orang lain dan saya juga takut nanti kamu (terdakwa) marah kepada anak orang tersebut" kemudian terdakwa langsung marah dan langsung memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mata saksi korban lalu terdakwa kembali memukul saksi korban namun saksi korban menghindar atau mengelak dari pukulan tangan kanan terdakwa dengan cara memalingkan kepala saksi korban ke samping sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Simpang Timbangan Nomor: 445/63/KES/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh dr.Sary Indriany bahwa pada pemeriksaan luar korban terdapat bengkak dikepala serta merah di keuda mata dengan kesimpulan korban menderita luka ringan akibar benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (1) UUR.I NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga





perempuan yang mendamba hidup nyaman dengan kemewahan. Tidak berhenti sampai disitu pernikahan siri juga menimbulkan dampak hukum dan lagi-lagi istri yang harus menerimanya akibatnya. Akibat dari Pernikahan Siri tersebut adalah:

- a) Pihak istri tidak dianggap sebagai istrinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai istri tidak bias menuntut apa-apa.
- b) Pihak istri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbatas dari tanggung jawab, maka bukan tidak mungkin jika pernikahan siri membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap istri. Bila terjadi kekerasan terhadap istri, baik kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual, maka istri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c) Pihak istri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau istri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan

- d) Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai istri kedua, maka hak waris jatuh ketangan istri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.
- e) Semua dampak hukum yang menjadi beban istri diatas juga berlaku bagi anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural bagi anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya
- f) Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena





Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.
- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak



